

TAJUK RENCANA

Tabir Gelap Kasus Novel

BOLEH dibalang ini adalah ironi proses penegakan hukum terhadap kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Publik menyaksikan betapa berliku proses hukum untuk menangkap pelaku dan penyerang Novel. Bahkan, kasus tersebut bukan lagi menjadi isu nasional, melainkan berskala internasional mengingat kasus penganiayaan yang menimpa Novel masuk level tinggi, yakni direncanakan dan menimbulkan luka berat. Namun jaksa hanya menuntut penyerang Novel, yakni Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, dengan hukuman satu tahun penjara. Salah satu pertimbangannya karena mereka sudah meminta maaf.

Kita menghormati tuntutan tersebut karena hal itu sepenuhnya kewenangan jaksa. Namun, semua pihak berhak mempertanyakan mengapa untuk kasus penganiayaan yang berskala tinggi itu, bahkan juga mengundang perhatian serius Presiden Jokowi, jaksa menuntut hukuman yang ringan? Publik tentu mudah untuk membandingkan dengan kasus penganiayaan lain yang bersifat biasa, bahkan ringan yang ancaman hukumannya juga ringan. Karenanya wajar bila tuntutan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak (KR 13/6).

Namun, episode proses hukum terhadap penyerang Novel belum berakhir. Kini harapan ada pada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyidangkan kasus tersebut. Semua pihak berharap majelis hakim mendengar dan mengkomodasi suara keadilan masyarakat, sehingga akan tercermin dalam putusannya nanti. Harapan ini tentu tidak berlebihan, mengingat kasus Novel bukan saja telah menguras energi dalam penegakan hukumnya, melainkan juga akan menjadi batu ujian bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan.

Bisa dibayangkan, bila penyidik senior KPK saja tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai, bahkan penye-

rangnya hanya dihukum ringan, maka nasib pemberantasan korupsi di negeri ini bakal terancam. Mereka akan dicampakkan ketakutan ketika hendak mengusut kasus berskala besar, apalagi yang melibatkan elite politik, sehingga penegakan hukumnya menjadi tidak maksimal. Tanda-tanda ke arah itu sebenarnya sudah terlihat dalam penanganan kasus korupsi mantan Sekjen MA Nurhadi dan politikus Harun Masiku yang buron. Publik bisa merasakan ada tangan-tangan tak terlihat yang intervensi dalam kasus tersebut sehingga proses hukum menjadi berbelit.

Mencermati fenomena di atas, kita tak terlalu optimis kasus penyerangan Novel bakal terungkap tuntas. Proses penanganan perkara terhadap penyerang Novel saja sudah menimbulkan kontroversi. Bahkan Novel menyebut jaksa berperan seperti pembela terdakwa. Namun proses ini belum berakhir, bahkan sampai keduanya diputus bersalah sekalipun, masih belum memberi gambaran utuh kasus Novel.

Publik berharap otak atau dalang di balik penyerangan Novel terungkap. Bila hanya Rahmat Kadir dan Ronny Bugis yang diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa penyerangan terhadap Novel, maka substansi kasus ini menjadi tidak jelas. Pertanyaan publik pun tidak akan terjawab: siapa yang menyuruh mereka melakukan penyerangan terhadap Novel, apa motifnya atau terkait kasus apa sehingga Novel diserang?

Kini kita hanya berharap majelis hakim yang menyidangkan kasus ini membuka tabir gelap di balik kasus penyerangan Novel. Dalam persidangan tersebut mungkin tidak akan terungkap dalang di balik kasus tersebut, namun paling tidak ada petunjuk yang mengarah ke sana. Itu dengan asumsi bahwa kedua terdakwa yang menyerang Novel. Namun, bila mereka bukan pelaku sesungguhnya, maka jalan menuju pengungkapan kasus penyerangan Novel Baswedan makin berliku. □

Korona, Konservatisme dan Masa Depan Bangsa

WABAH virus korona (Covid-19) menghentak dunia. Korona adalah sebuah ujian bagi sebuah bangsa dari sisi ketahanan politik, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan kesehatan. Sebuah negara yang mapan idealnya bisa mempertahankan keberlangsungan keempat hal tersebut. Dalam praktiknya, keempat hal tersebut tidak semuanya bisa dijaga dan diperhatikan secara merata.

Sebaiknya pemerintah memberikan porsi lebih dan prioritas pada ketahanan kesehatan dan ketahanan pangan. Jika dua hal tersebut bisa diselamatkan, politik akan stabil karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terjaga. Ketahanan kesehatan lebih diprioritaskan. Karena orang yang meninggal sudah tidak bisa dihidupkan lagi, namun ekonomi lesu atau mati suri bisa digerakkan lagi dengan kerja keras dan *political will* pemerintah.

Salah satu tantangan Bangsa Indonesia saat ini adalah keengganan sebagian masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Keengganan tersebut antara lain dilatarbelakangi konservatisme yang menjangkiti kalangan agamawan, terdidik dan politisi.

Penolakan

Di kalangan agamawan, konservatisme antara lain berwujud penolakan terhadap anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dalam menyelenggarakan ibadah keagamaan. Mereka berargumen seharusnya umat beragama lebih takut Tuhan daripada takut Covid-19. Mereka juga berargumen bahwa taqdir itu di tangan Tuhan.

Konservatisme juga merambah ke sebagian kaum terdidik. Sebagian mereka juga berargumen, Covid-19 adalah salah satu bentuk konspirasi China dan *dajjal*. Mereka sangat yakin bahwa ada konspirasi besar dibalik wabah korona.

Asfa Widiyanto

Tujuannya, menumbuhkan rasa takut di kalangan masyarakat. Pendidikan, idealnya mengantarkan orang berpikir lebih luas. Sayangnya, sebagian orang berpendidikan menunjukkan gejala pemikiran tertutup.

Kecenderungan konservatisme di kalangan politisi antara lain berwujud dalam sikap politik yang lebih mengutamakan perkembangan ekonomi daripada



KR-JOKO SANTOSO

keselamatan dan kesehatan bangsa. Juga terlihat dari sikap politik yang lebih menekankan untuk meraup popularitas di atas merebaknya bencana, ketimbang memberikan solusi yang lebih bermanfaat bagi keselamatan bersama.

Menjadi Cerah

Masa depan Bangsa Indonesia bisa menjadi cerah dan bisa memutus rantai penyebaran virus korona, jika kita bisa mengatasi problem konservatisme yang menjangkiti sebagian masyarakat kita. Tokoh-tokoh agama yang progresif dan berpikiran luas sebaiknya turun gunung mencerahkan masyarakat. Dalam konteks Covid-19, menjaga keberlang-

sungan hidup manusia (*hifz al-nafs*) lebih diprioritaskan.

Kalangan terdidik yang tercerahkan seharusnya turun gunung mencerahkan masyarakat, bukan hanya sibuk dengan urusan-urusan akademik semata. Mereka diharapkan bisa memecahkan persoalan ekepribadian pecah (*split personality*) yang menjangkiti sebagian kaum terdidik. Kepribadian pecah antara lain terlihat di sebagian kaum terdidik, yang kritis dan hati-hati dalam melaksanakan penelitian ilmiah, namun tidak kritis dalam mengonsumsi berita di media mainstream dan sosial media.

Kaum politisi yang tercerahkan juga bertanggung jawab untuk mencerahkan rekannya sesama politisi. Tujuan dari politik itu idealnya adalah kemashlahatan umum, bukan semata kekuasaan dan kepentingan kelompok. Dalam konteks sekarang, menjaga masyarakat dari terjangkitnya virus korona lebih diutamakan daripada hal-hal lain yang bersifat politis.

Kita berharap Indonesia akan menang melawan virus korona. Dan itu butuh dukungan semua, baik kaum agamawan, politisi, maupun kaum terdidik, tidak hanya mengandalkan kerja keras tenaga kesehatan dan pemerintah. Alangkah indah bila kita menyadari bahwa bahtera Indonesia adalah laksana bahtera milik kita bersama, yang seharusnya kita jaga dari orang-orang yang ingin mengancam keselamatan kita bersama. Indonesia harus menang melawan korona.

***) Prof Dr phil Asfa Widiyanto MA,**
Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga
dan alumnus Universitas Bonn,
Jerman)

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opini@kr.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih

Pikiran Pembaca
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax: (0274) 563125 Telp: (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Normal Baru dan Pengendalian Sosial

SUDAH sekitar tiga bulan Indonesia diterpa Covid-19. Pemerintah pusat pun sepertinya mulai melunak dengan kasus Covid-19 ini dengan memberi kesempatan untuk beberapa daerah menerapkan *new normal*, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bukan tanpa alasan *new normal* tersebut berdasarkan data keilmuan protokol kesehatan. *New normal* memungkinkan pemerintah daerah untuk membuka/menjalankan aktivitas yang sebelumnya dihentikan atau dibatasi termasuk kegiatan ekonomi dan ibadah. Imbauan untuk di rumah saja, cuci tangan, dan memakai masker pun masih gencar digaungkan.

Meskipun terdapat peningkatan kasus positif Covid-19, beberapa daerah di Indonesia tetap bersikukuh untuk membuka kembali sejumlah ruang publik yang selama beberapa waktu terakhir ini ditutup. Tidak sedikit pula warga yang mulai mencoba untuk beraktivitas seperti semula. Berbagai alasan seperti bosan dan ingin menghibur diri kerap kali menjadi alasan warga untuk keluar rumah. Beberapa pusat kota dan pusat perbelanjaan mulai ramai. Warga seakan acuh akan kesehatan orang lain dan dirinya. Dalam sosiologi, tindakan warga tersebut diartikan sebagai perilaku yang menyimpang.

Menurut Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang dilihat sebagai tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Dalam kasus yang terjadi, terdapat beberapa komunitas atau sekumpulan warga yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Physical Distancing. Hal tersebut memungkinkan membuka klaster baru Covid-19, dan menyulitkan untuk dilaksanakan tracking sehingga bisa jadi menambah daftar panjang kasus Covid-19 di Indonesia, apabila beberapa warga masih tidak mematuhi aturan/norma yang dibuat oleh pemerintah.

Ahli lain seperti Robert K Merton mengatakan, kasus penyimpangan ini sebagai bentuk ritualisme, yang artinya subjek menjalankan cara-cara yang ditentukan/dibertlakukan sebagai formalitas semata, namun sebenarnya ia tidak lagi mengarah ke tujuan semula (mempunyai tujuannya sendiri yang berbeda). Sebagai contoh, warga yang melakukan penyimpangan tersebut berusaha untuk menjaga (kesehatan) diri mereka dengan bersepeda, berolahraga, namun ada hal mendasar yang terlupakan yaitu menjalankan protokol kesehatan dengan berkumpul dan tidak menggunakan masker. Beberapa warga pun seakan menganggap diri mereka bisa melakukan apa saja ketika mereka sudah bermasker.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah melalui Satpol PP, kepolisian dan organisasi masyarakat sudah melakukan upaya preventif dengan melakukan pengendalian sosial. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menertibkan anggota masyarakat yang melanggar peraturan. Pengendalian sosial tersebut berupa ajakan (persuasif), imbauan maupun paksaan. Pemerintah daerah, Dinas Perhubungan dan polisi dapat juga melakukan pengendalian sosial dengan membatasi akses ke wilayah yang berpotensi menciptakan kerumunan, dan melakukan pengecekan kepada setiap warga yang akan masuk ke wilayah tertentu (seperti batas kota dan batas wilayah). Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai Covid-19, mengurangi pelanggaran *physical distancing* dan memberikan efek jera agar warga tetap di rumah.

Oleh karena itu sebaiknya kita menjalankan *new normal* dengan sewajarnya. Keluar rumah hanya jika kebutuhan mendasar dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan. Dimulainya *new normal* bukan berarti berakhirnya pandemi Covid-19. □

Antonius Ranauria Timur SPd, Guru Sosiologi SMA Bopkri 1 Yogya.

'Road Safety' di Era Normal Baru

DITLANTAS Polda DIY saat ini tengah gencar mengampanyekan tatanan kehidupan baru atau *new normal*. Kampanye ini bertujuan, agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan pandemi virus korona. Selain fokus pada *road safety* menjaga gerak lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar, juga berupaya membantu pemerintah mendisiplinkan masyarakat mengacu pada protokol kesehatan. Antara lain, secara rutin melakukan sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan dibarengi dengan pembagian masker secara gratis. Kini termasuk ikutserta melakukan razia bagi pengguna lalu lintas jalan yang 'tertangkap tangan' tidak mengenakan masker.

Elaborasi *road safety* dan penanganan Covid-19 diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini tidak terlepas dari upaya kepolisian untuk selalu memperbaiki pola pemolisian menuju kebijakan keselamatan berlalu lintas. Pemolisian di bidang *road safety* dibangun untuk mendukung program pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Serentak

Tentu, program ini secara serentak didukung para Kasatlantas jajaran di semua Polres di wilayah Polda DIY. Apalagi kita menyadari, Covid-19 sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Dan hampir tiga bulan lebih, masyarakat Indonesia telah 'dikurung' di rumah, mengurangi beraktivitas di luar. Belum lagi pemerintah hanya membolehkan 11 sektor kegiatan masyarakat yang boleh dijalani. Pemerintah juga 'memaksa' masyarakat untuk selalu membersihkan diri, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tidak bisa kita hindari, dampak pen-

I Made Agus Prasatya

erapan PSBB menjadikan perekonomian lumpuh, daya beli masyarakat melemah, angka pengangguran dan PHK meningkat. Melihat kenyataan di lapangan Presiden Jokowi pada akhirnya menerapkan tatanan kehidupan baru masyarakat. Menyongsong tatanan normal baru, Kementerian Kesehatan pun menyiapkan protokol yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat tetap produktif dalam koridor aman. Kebijakan inilah antara lain pedoman Ditlantas Polda DIY dalam mengampanyekan tatanan norma baru.

Dalam normal baru, persoalan memang tidak sekompleks masker, hand-sanitizer atau jaga jarak semata. Jajaran Ditlantas Polda DIY yang tersebar di tingkat polres, juga harus bisa memetakan daerah-daerah rawan penularan. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, perlu juga dibangun jaringan komunikasi dengan seluruh stakeholder, sehingga apabila ada permasalahan yang menimbulkan gangguan dapat diselesaikan

Paling Efektif

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas di tengah pandemi Covid-19, salah satu langkah yang dilakukan adalah menggiatkan patroli, baik ditingkat Polda maupun Polres. Patroli ini terus dioptimalkan di daerah-daerah rawan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dengan patroli kita bisa temukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan.

Diperlukan disiplin sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat, menyongsong kenormalan baru di wilayah DIY. Kedisiplinan ini upaya paling efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Memang, keberhasilan tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran polisi di dalamnya.

Peran polisi yang demikian krusial dan signifikan tentu menjadi tugas cukup berat yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polisi pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum. Sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan kaitannya dengan Covid-19. Pada saat yang sama, seluruh personel polisi di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya karena kemungkinan tertular virus ini juga sangat besar.

***) Kombes Pol I Made Agus Prasatya SIK MHum, Direktur Lalu Lintas Polda DIY.**

Pojok KR

Penyerang Novel harus dihukum maksimal.
-- Berharap hakim penuh rasa keadilan masyarakat.

Sambut normal baru, masih butuh perbaikan.
-- Termasuk perbaikan mental masyarakat.

Pelaku usaha di DIY optimal garap pasar lokal.
-- Tetap patuhi protokol pencegahan Covid-19.

Berabe

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

(Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Grogongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685